



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022

TENTANG

STANDAR PENOMORAN PERKARA
PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diresmikannya 4 Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum berdasarkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara maka perlu disusun kode penomoran perkara bagi seluruh Pengadilan Tinggi baru tersebut;
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan / Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung yang mencabut SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan

Standar Penomoran....

Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum maka perlu diatur standar/pedoman penomoran perkara agar tidak terjadi kekosongan pengaturan penomoran perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diberlakukan Pedoman Penomoran Perkara pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN....

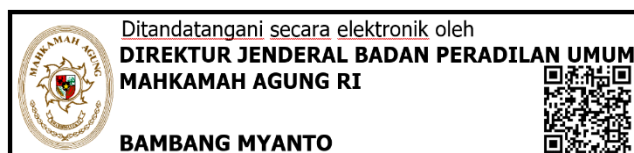
M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG STANDAR PENOMORAN PERKARA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Standar Penomoran Perkara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1 YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
- 2 YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
- 3 YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 4 Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi;
- 5 Yth. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri.

Lampiran Surat Keputusan
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor : 2478/DJU/SK/HK00.1/12/2022
Tanggal : 16 Desember 2022

STANDAR PENOMORAN PERKARA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI

A. KETENTUAN UMUM

Penomoran perkara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dilakukan sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI (Pola Bindalmin). Nomor perkara pada perkara perdata dibuat oleh Kasir berdasarkan nomor urut dalam buku jurnal keuangan untuk perkara yang didaftarkan secara manual atau melalui validasi pendaftaran di aplikasi SIPP untuk perkara yang didaftarkan melalui E-Court. Nomor perkara pada perkara pidana dibuat oleh petugas Meja 1 berdasarkan tata urutan penerimaan perkara.

Penulisan nomor perkara tidak dimulai dengan angka 0. Penulisan angka menggunakan numeral (arab) dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penulisan nomor perkara pada putusan harus ditulis cetak tebal (bold), di bawah judul dengan awalan huruf kapital dan diikuti huruf kecil dengan berjarak satu spasi garis antara judul dengan penomoran. Kata nomor tidak disingkat menjadi No.

B. SUSUNAN PENOMORAN PERKARA

Susunan nomor perkara adalah sebagai berikut: angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan singkatan jenis perkara), garis miring, tahun, garis miring, PN atau PT (huruf kapital), spasi, kode pengadilan yang menyidangkan (Lihat bagian F. Singkatan PN & PT).

Seperti contoh sebagai berikut:

Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Wat

Nomor 123/Pid.B/2022/PN TTE

C. HURUF DAN JARAK ANTAR HURUF

Huruf yang digunakan adalah Arial ukuran 12 skala 100%. Spasi normal (tidak expanded maupun condensed).

D. KAIDAH KHUSUS

1. Perdata

Klasifikasi perdata umum dan perdata khusus memperhatikan ketentuan Buku II Mahkamah Agung (Pola Bindalmin). Perkara perdata umum terbagi atas perkara gugatan yang menggunakan kode Pdt.G (contoh: Nomor 123/Pdt.G/2010/PN Wat) dan perkara

permohonan yang menggunakan kode Pdt.P (contoh: Nomor 123/Pdt.P/2010/PN Wat).

Perkara perdata khusus yaitu perkara perdata yang diatur melalui peraturan perundang-undangan khusus (sesuai tabel).

Penomoran perkara perdata, baik dalam berita acara maupun dalam putusan, dibuat secara berurut berdasarkan nomor unit pada buku jurnal.

Beberapa catatan khusus dalam pemberian nomor:

- a. perkara verzet terhadap putusan verstek (contoh: Nomor 123/Pdt.G/2010/PN Wat) tidak didaftar sebagai perkara baru, dengan tata urutan penomoran sebagai berikut:
Nomor 123/Pdt.Plw/2010/PN Wat.
- b. perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) didaftarkan sebagai perkara baru, dengan tata urutan penomoran sebagai berikut:
Nomor 10/Pdt.Bth/2012/PN Wat.
- c. Gugatan intervensi mengikuti perkara pokok (tidak di daftar dan tidak diberi nomor perkara baru).

Perkara perdata khusus meliputi:

- a. Permohonan Pernyataan Pailit dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pailit-PKPU)
- b. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- c. Arbitrase (Arbt)
- d. Perkara-perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- e. Perkara-perkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- f. Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI)
- g. Perkara Partai Politik (Parpol)
- h. Perkara Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Penomoran perkara perdata khusus adalah sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan kata "Sus", tanda hubung, singkatan perkara khusus), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan (PN spasi Singkatan PN).

Khusus pengadilan niaga, kode pengadilannya adalah PN spasi Niaga spasi Singkatan PN.

- a. Nomor 123/Pdt.Sus-Pailit/2010/PN Niaga Smg.
- b. Nomor 123/Pdt.Sus-PKPU/2010/PN Niaga Smg.
- c. Nomor 123/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2010/PN Niaga Smg.
- d. Nomor 123/Pdt.Sus-Renvoi/2010/PN Niaga Smg.
- e. Nomor 123/Pdt.Sus-Homologasi/2010/PN Niaga Smg.

- f. Nomor 123/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2010/PN Niaga Smg.
- g. Nomor 24/Pdt.Sus-HKI/2010/PN Niaga Sby.
- h. Nomor 15/Pdt.Sus-Arbt/2010/PN Niaga Smg.
- i. Nomor 28/Pdt.Sus-KPPU/2010/PN Btm.
- j. Nomor 12/Pdt.Sus-BPSK/2010/PN Plg.
- k. Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2010/PN Bdg.
- l. Nomor 123/Pdt.Sus-Parpol/2010/PN Cbn.
- m. Nomor 12/Pdt.Sus-KIP/2010/PN Yyk.

2. Pidana

Penomoran tindak pidana umum (berasal dari KUHP) menggunakan kode Pid.B untuk perkara dengan acara biasa, Pid.S untuk perkara dengan acara singkat, Pid.C untuk perkara dengan acara cepat (tindak pidana ringan) dan Pid.LL untuk pelanggaran lalu-lintas.

Perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Perkara dengan acara cepat adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp7500,00 yang mencakup: tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas dan penghinaan ringan. Seperti contoh berikut:

Nomor123/Pid.B/2010/PNJkb

Nomor 1/Pid.S/2011/PN Jks

Nomor 4/Pid.C/2011/PN Jku

Penomoran tindak pidana khusus (yang diatur diluar KUHP) menggunakan kode Pid.Sus, seperti misalnya:

Nomor 200/Pid.Sus/2011/PN Sby (Narkotika)

Nomor 201/Pid.Sus/2011/PN Sby (Terorisme)

Nomor 202/Pid.Sus/2011/PN Sby (Pencucian Uang)

Nomor 204/Pid.Sus/2011/PN Sby (Perdagangan Orang)

Untuk pengadilan khusus seperti Pengadilan Tipikor, Pengadilan HAM, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Anak, penulisan nomor adalah sebagai berikut, nomor (tidak disingkat menjadi No.), spasi, angka, garis miring, jenis perkara (berupa singkatan huruf pertama menggunakan huruf kapital diakhiri dengan titik, diikuti dengan kata "Sus", tanda hubung, singkatan pengadilan khusus), garis miring, tahun, garis miring, kode pengadilan yang menyidangkan (PN spasi Singkatan PN). Seperti contoh sebagai berikut:

Nomor 200/Pid.Sus-TPK/2010/PN Smg

Nomor 200/Pid.Sus-HAM/2011/PN Mdn

Nomor 200/Pid.Sus-Prk/2011/PN Jku

Nomor 200/Pid.Sus-Anak/2010/PN Bdg

E. RINGKASAN KODE PERKARA BERDASARKAN KLASIFIKASI PERKARA

Klasifikasi Jenis Perkara Besar	#	Klasifikasi Perkara	Kode
Perdata Umum	1	Permohonan	Pdt.P
	2	Gugatan	Pdt.G Pdt.Plw (untuk perkara <i>verzet</i> atas putusan <i>verstek</i>) Pdt.Bth (untuk perkara <i>derden verzet</i>)
Perdata Khusus	3	Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	Pdt.Sus-Pailit Pdt.Sus-PKPU Pdt. Sus-Gugatan Lain-lain Pdt.Sus-Actio Pauliana Pdt.Sus-Renvoi
	4	Hak Kekayaan Intelektual	Pdt.Sus-HKI
	5	Arbitrase	Pdt.Sus-Arbt
	6	Perkara-perkara pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	Pdt.Sus-KPPU
	7	Perkara-perkara pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	Pdt.Sus-BPSK
	8	Perkara Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI)	Pdt.Sus-PHI
	9	Perkara Partai Politik (Parpol)	Pdt.Sus-Parpol
	10	Perkara Keterbukaan Informasi	Pdt.Sus-KIP
Pidana Umum	11	Pidana Biasa	Pid.B
		Pidana Singkat	Pid.S
		Pidana Cepat	Pid.C (Tindak Pidana Ringan) Pid.LL
Pengadilan Khusus	12	Pengadilan HAM	Pid.Sus-HAM
	13	Pengadilan Tipikor	Pid.Sus-TPK
	14	Pengadilan Perikanan	Pid.Sus-PRK
	15	Pengadilan Anak	Pid.Sus-Anak
Pidana Khusus	16	Tindak Pidana Khusus Lain-lain: KDRT Tindak Pidana Lingkungan Hidup Tindak Pidana Kehutanan Tindak Pidana Pemberitaan Tindak Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Narkotika dan Obat Terlarang Terorisme Perdagangan Manusia	Pid.Sus

F. KODE SINGKATAN KOTA

No.	PT / PN	Kode
I	PT BANDA ACEH	BNA
1	PN Banda Aceh	Bna
2	PN Lhokseumawe	Lsm
3	PN Bireun	Bir
4	PN Langsa	Lgs
5	PN Sabang	Sab
6	PN Calang	Cag
7	PN Tapaktuan	Ttn
8	PN Singkil	Skl
9	PN Meulaboh	Mbo
10	PN Sinabang	Snb
11	PN Sigli	Sgi
12	PN Lhoksukon	Lsk
13	PN Idi	Idi
14	PN Takengon	Tkn
15	PN Blangkejeren	Bkj
16	PN Kutacane	Ktn
17	PN Kualasimpang	Ksp
18	PN Jantho	Jth
19	PN Simpang Tiga	Str
20	PN Blangpidie	Bpd
21	PN Meuredue	Mrn
22	PN Suka Makmue	Skm
II	PT MEDAN	MDN
1	PN Medan	Mdn
2	PN Pematang Siantar	Pms
3	PN Binjai	Bnj
4	PN Lubuk Pakam	Lbp
5	PN Simalungun	Sim
6	PN Tarutung	Trt
7	PN Padang Sidempuan	Psp
8	PN Tanjung Balai	Tjb
9	PN Tebing Tinggi	Tbt
10	PN Kabanjahe	Kbj
11	PN Gunung Sitoli	Gst
12	PN Rantau Prapat	Rap
13	PN Sidikalang	Sdk
14	PN Sibolga	Sbg
15	PN Kisaran	Kis
16	PN Stabat	Stb
17	PN Mandailing Natal	Mdl
18	PN Balige	Blg
19	PN Sei Rampah	Srh
20	PN Sibuhuan	Sbh
III	PT PADANG	PDG
1	PN Padang	Pdg
2	PN Bukittinggi	Bkt
3	PN Pariaman	Pmn
4	PN Payukumbuh	Pyh
5	PN Lubuk Sikaping	Lbs
6	PN Batusangkar	Bsk

7	PN Solok	Slk
8	PN Sawah Lunto	Swl
9	PN Painan	Pnn
10	PN Padang Panjang	Pdp
11	PN Lubuk Basung	Lbb
12	PN Tanjung Pati	Tjp
13	PN Muaro	Mrj
14	PN Kotobaru	Kbr
15	PN Pasaman Barat	Psb
16	PN Pulau Punjung	Plj
IV	PT RIAU	PBR
1	PN Pekanbaru	Pbr
2	PN Dumai	Dum
3	PN Bangkinang	Bkn
4	PN Bangkalis	Bls
5	PN Rengat	Rgt
6	PN Tembilahan	Tbh
7	PN Pasir Pengaraian	Prp
8	PN Pelalawan	Plw
9	PN Rokan Hilir	Rhl
10	PN Siak Sri Indrapura	Sak
11	PN Teluk Kuantan	Tlk
V	PT JAMBI	JMB
1	PN Jambi	Jmb
2	PN Bangko	Bko
3	PN Kuala Tungkal	Klt
4	PN Muara Bulian	Mbn
5	PN Muara Bungo	Mrb
6	PN Sungai Penuh	Spn
7	PN Sengeti	Snt
8	PN Tebo	Mrt
9	PN Sarolangun	Srl
10	PN Tanjung Jabung Timur	Tjt
VI	PT PALEMBANG	PLG
1	PN Palembang	Plg
2	PN Lubuk Linggau	Llg
3	PN Kayu Agung	Kag
4	PN Lahat	Lht
5	PN Batu Raja	Bta
6	PN Muara Enim	Mre
7	PN Sekayu	Sky
8	PN Pagar Alam	Pga
9	PN Prabumulih	Pbm
10	PN Pangkalan Balai	Pkb
VII	PT BENGKULU	BGL
1	PN Bengkulu	Bgl
2	PN Curup	Crp
3	PN Manna	Mna
4	PN Arga Makmur	Agm
5	PN Bintuhan	Bhn
6	PN Tais	Tas
7	PN Kepahiang	Kph
8	PN Tubei	Tub

9	PN Mukomuko	Mkm
VIII	PT TANJUNG KARANG	TJK
1	PN Tanjung Karang	Tjk
2	PN Metro	Met
3	PN Kotabumi	Kbu
4	PN Kalianda	Kla
5	PN Liwa	Liw
6	PN Sukadana	Sdn
7	PN Gunung Sugih	Gns
8	PN Blambangan Umpu	Bbu
9	PN Menggala	Mgl
10	PN Kota Agung	Kot
11	PN Gedong Tataan	Gdt
IX	PT JAKARTA	DKI
1	PN Jakarta Pusat	Jkt.Pst
2	PN Jakarta Barat	Jkt.Brt
3	PN Jakarta Selatan	Jkt.Sel
4	PN Jakarta Utara	Jkt.Utr
5	PN Jakarta Timur	Jkt.Tim
X	PT BANDUNG	BDG
1	PN Bandung	Bdg
2	PN Bekasi	Bks
3	PN Bale Bandung	Blb
4	PN Cirebon	Cbn
5	PN Sukabumi	Skb
6	PN Bogor	Bgr
7	PN Karawang	Kwg
8	PN Cibinong	Cbi
9	PN Cianjur	Cjr
10	PN Tasikmalaya	Tsm
11	PN Indramayu	Idm
12	PN Depok	Dpk
13	PN Purwakarta	Pwk
14	PN Cibadak	Cbd
15	PN Sumber	Sbr
16	PN Sumedang	Smd
17	PN Majalengka	Mjl
18	PN Ciamis	Cms
19	PN Kuningan	Kng
20	PN Garut	Grt
21	PN Subang	Sng
22	PN Banjar	Bjr
23	PN Cikarang	Ckr
XI	PT JAWA TENGAH	SMG
1	PN Semarang	Smg
2	PN Surakarta	Skt
3	PN Sragen	Sgn
4	PN Tegal	Tgl
5	PN Pekalongan	Pkl
6	PN Magelang	Mgg
7	PN Purwokerto	Pwt
8	PN Kudus	Kds
9	PN Cilacap	Clp

10	PN Pati	Pti
11	PN Klaten	Kln
12	PN Ungaran	Unr
13	PN Jepara	Jpa
14	PN Kendal	Kdl
15	PN Sukoharjo	Skh
16	PN Salatiga	Slr
17	PN Blora	Bla
18	PN Kebumen	Kbm
19	PN Purworejo	Pwr
20	PN Brebes	Bbs
21	PN Purwodadi	Pwd
22	PN Demak	Dmk
23	PN Pemalang	Pml
24	PN Rembang	Rbg
25	PN Banyumas	Bms
26	PN Purbalingga	Pbg
27	PN Banjarnegara	Bnr
28	PN Temanggung	Tmg
29	PN Wonosobo	Wsb
30	PN Wonogiri	Wng
31	PN Karanganyar	Krg
32	PN Boyolali	Byl
33	PN Batang	Btg
34	PN Slawi	Slw
35	PN Mungkid	Mkd
XII	PT YOGYAKARTA	YYK
1	PN Yogyakarta	Yyk
2	PN Sleman	Smn
3	PN Wates	Wat
4	PN Wonosari	Wno
5	PN Bantul	Btl
XIII	PT SURABAYA	SBY
1	PN Surabaya	Sby
2	PN Sidoarjo	Sda
3	PN Malang	Mlg
4	PN Bondowoso	Bdw
5	PN Jember	Jmr
6	PN Kediri	Kdr
7	PN Madiun	Mad
8	PN Pamekasan	Pmk
9	PN Gresik	Gsk
10	PN Banyuwangi	Byw
11	PN Blitar	Blr
12	PN Kab. Kediri	Gpr
13	PN Tulung Agung	Tlg
14	PN Kepanjen	Kpn
15	PN Bojonegoro	Bjn
16	PN Mojokerto	Mjk
17	PN Jombang	Jbg
18	PN Lumajang	Lmj
19	PN Pasuruan	Psr
20	PN Ponorogo	Png
21	PN Probolinggo	Pbl
22	PN Bangil	Bil

23	PN Situbondo	Sit
24	PN Sumenep	Smp
25	PN Bangkalan	Bkl
26	PN Kab. Madiun	Mjy
27	PN Kraksaan	Krs
28	PN Lamongan	Lmg
29	PN Magetan	Mgt
30	PN Nganjuk	Njk
31	PN Ngawi	Ngw
32	PN Pacitan	Pct
33	PN Sampang	Spg
34	PN Trenggalek	Trk
35	PN Tuban	Tbn
XIV	PT BANJARMASIN	BJM
1	PN Banjarmasin	Bjm
2	PN Kandangan	Kgn
3	PN Kotabaru	Ktb
4	PN Barabai	Brb
5	PN Martapura	Mtp
6	PN Tanjung	Tjg
7	PN Amuntai	Amt
8	PN Rantau	Rta
9	PN Marabahan	Mrh
10	PN Pelaihari	Pli
11	PN Banjarbaru	Bjb
12	PN Batulicin	Bln
13	PN Paringin	Prn
XV	PT PALANGKARAYA	PLK
1	PN Palangkaraya	Plk
2	PN Sampit	Spt
3	PN Pangkalan Bun	Pbu
4	PN Kuala Kapuas	Klk
5	PN Muara Teweh	Mtw
6	PN Buntok	Bnt
7	PN Tamiang Layang	Tml
8	PN Kasongan	Ksn
9	PN Kuala Kurun	Kkn
10	PN Nanga Bulik	Ngb
11	PN Pulang Pisau	Pps
XVI	PT PONTIANAK	PTK
1	PN Pontianak	Ptk
2	PN Singkawang	Skw
3	PN Sintang	Stg
4	PN Ketapang	Ktp
5	PN Mempawah	Mpw
6	PN Sanggau	Sag
7	PN Putusibau	Pts
8	PN Bengkayang	Bek
9	PN Sambas	Sbs
10	PN Ngabang	Nba
XVII	PT KALIMANTAN TIMUR	SMR
1	PN Samarinda	Smr
2	PN Balikpapan	Bpp

3	PN Tenggara	Trg
4	PN Tanjung Redep	Tnr
5	PN Tanah Grogot	Tgt
6	PN Bontang	Bon
7	PN Sangatta	Sgt
8	PN Kutai Barat	Sdw
9	PN Penajam	Pnj
XVIII	PT MAKASSAR	MKS
1	PN Makassar	Mks
2	PN Watampone	Wtp
3	PN Maros	Mrs
4	PN Sungguminasa	Sgm
5	PN Makale	Mak
6	PN Bulukumba	Blk
7	PN Palopo	Plp
8	PN Parepare	Pre
9	PN Bantaeng	Ban
10	PN Watansopeng	Wns
11	PN Enrekang	Enr
12	PN Pangkajene	Pkj
13	PN Barru	Bar
14	PN Sidrap	Sdr
15	PN Takalar	Tka
16	PN Selayar	Slr
17	PN Jeneponto	Jnp
18	PN Sinjai	Snj
19	PN Pinrang	Pin
20	PN Sengkang	Skng
21	PN Masamba	Msb
22	PN Malili	Mll
23	PN Belopa	Blp
XIX	PT SULAWESI TENGGARA	KDI
1	PN Kendari	Kdi
2	PN Bau-Bau	Bau
3	PN Raha	Rah
4	PN Kolaka	Kka
5	PN Unaaha	Unh
6	PN Andoolo	Adl
7	PN Pasarwajo	Psw
8	PN Lasusua	Lss
9	PN Wangi Wangi	Wgw
XX	PT SULAWESI TENGAH	PAL
1	PN Palu	Pal
2	PN Poso	Pso
3	PN Luwuk	Lwk
4	PN Tolitoli	Tli
5	PN Donggala	Dgl
6	PN Buol	Bul
7	PN Parigi	Prg
XXI	PT MANADO	MND
1	PN Manado	Mnd
2	PN Tondano	Tnn
3	PN Bitung	Bit

4	PN Kotamobagu	Ktg
5	PN Tahuna	Thn
6	PN Air Madidi	Arm
7	PN Amurang	Amr
8	PN Melonguane	Mgn
XXII	PT DENPASAR	DPS
1	PN Denpasar	Dps
2	PN Singaraja	Sgr
3	PN Semarapura	Srp
4	PN Negara	Nga
5	PN Tabanan	Tab
6	PN Amlapura	Amp
7	PN Gianyar	Gin
8	PN Bangli	Bli
XXIII	PT NUSA TENGGARA BARAT	MTR
1	PN Mataram	Mtr
2	PN Rababima	Rbi
3	PN Selong	Sel
4	PN Sumbawa Besar	Sbw
5	PN Dompu	Dpu
6	PN Praya	Pya
XXIV	PT KUPANG	KPG
1	PN Kupang	Kpg
2	PN Atambua	Atb
3	PN Ende	End
4	PN Bajawa	Bjw
5	PN Kalabahi	Klb
6	PN Kefamenanu	Kfm
7	PN Larantuka	Lrt
8	PN Maumere	Mme
9	PN Ruteng	Rtg
10	PN So'e	Soe
11	PN Waikabubak	Wkb
12	PN Waingapu	Wgp
13	PN Lembata	Lbt
14	PN Rote Ndao	Rno
15	PN Labuhan Bajo	Lbj
16	PN Oelamasi	Olm
XXV	PT AMBON	AMB
1	PN Ambon	Amb
2	PN Tual	Tul
3	PN Masohi	Msh
4	PN Saumlaki	Sml
5	PN Dobo	Dob
6	PN Namlea	Nla
7	PN Dataran Hunipopu	Drh
8	PN Dataran Hunimoa	Dth
XXVI	PT JAYAPURA	JAP
1	PN Jayapura	Jap
2	PN Merauke	Mrk
3	PN Biak	Bik
4	PN Wamena	Wam

5	PN Nabire	Nab
6	PN Serui	Sru
7	PN Kota Timika	Tim
XXVII	PT MALUKU UTARA	TTE
1	PN Ternate	Tte
2	PN Soasiu	Sos
3	PN Labuha	Lbh
4	PN Tobelo	Tob
5	PN Sanana	Snn
6	PN Bobong	Bbg
XXVIII	PT BANTEN	BTN
1	PN Tangerang	Tng
2	PN Serang	Srg
3	PN Pandeglang	Pdl
4	PN Rangkasbitung	Rkb
XXIX	PT BANGKA BELITUNG	BBL
1	PN Pangkalpinang	Pgp
2	PN Sungai Liat	Sgl
3	PN Tanjung Pandan	Tdn
4	PN Koba	Kba
5	PN Mentok	Mtk
XXX	PT GORONTALO	GTO
1	PN Gorontalo	Gto
2	PN Limboto	Lbo
3	PN Tilamuta	Tmt
4	PN Marisa	Mar
XXXI	PT KEPULAUAN RIAU	TPG
1	PN Tanjung Pinang	Tpg
2	PN Batam	Btm
3	PN Tanjung Balai Karimun	Tbk
4	PN Ranai	Ran
XXXII	PT KALIMANTAN UTARA	TJS
1	PN Tanjung Selor	Tjs
2	PN Tarakan	Tar
3	PN Nunukan	Nnk
4	PN Malinau	Mln
XXXIII	PT SULAWESI BARAT	MAM
1	PN Mamuju	Mam
2	PN Polewali	Pol
3	PN Majene	Mjn
4	PN Pasang Kayu	Pky
XXXIV	PT PAPUA BARAT	MNK
1	PN Manokwari	Mnk
2	PN Sorong	Son
3	PN Fakfak	Ffk
4	PN Kaimana	Kmn